
PRRI DI SIBOLGA: SUDI HISTORIS PERGOLAKAN DAERAH 1957-1958

Siti Nurfatimah Sitompul¹, M. Farhan Matondang²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

Email: sitinurfatihmah777888@gmail.com¹, farhanbahagia46@gmail.com²

Abstrak: Penelitian ini mengkaji latar belakang, perkembangan, dan dampak pemberontakan PRRI di Sibolga. Rumusan masalah penelitian meliputi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemberontakan, jalannya peristiwa, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis berbagai sumber sejarah, seperti arsip, surat kabar, dan literatur terkait. Data dianalisis melalui tahap pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberontakan PRRI di Sibolga dipengaruhi oleh ketidakpuasan terhadap kondisi politik dan pembangunan daerah. Konflik yang terjadi menimbulkan korban jiwa, mengganggu stabilitas keamanan, serta melemahkan aktivitas ekonomi akibat terhambatnya perdagangan dan transportasi laut. Meskipun sempat menguasai beberapa wilayah, pasukan pemberontak akhirnya berhasil dikalahkan oleh pemerintah pusat dan Sibolga kembali berada di bawah kendali pemerintah.

Kata Kunci: PRRI, Sibolga, Sejarah.

Abstract: This study examines the background, development, and impact of the PRRI rebellion in Sibolga. The research problem formulation includes the factors that led to the rebellion, the course of events, and its impact on the lives of the people. The method used is historical research with a qualitative approach through library research and analysis of various historical sources, such as archives, newspapers, and related literature. Data were analyzed through the stages of source collection, source criticism, interpretation, and historical writing. The results indicate that the PRRI rebellion in Sibolga was influenced by dissatisfaction with the political conditions and regional development. The resulting conflict resulted in casualties, disrupted security stability, and weakened economic activity due to disruptions to trade and maritime transportation. Although the rebel forces briefly controlled several areas, they were ultimately defeated by the central government, and Sibolga returned to government control.

Keywords: PRRI, Sibolga, History.

PENDAHULUAN

Pada periode 1948–1965, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang mengancam persatuan nasional. Salah satu gejolak penting pada masa itu adalah munculnya gerakan PRRI/Permesta. Latar belakang kemunculan PRRI tidak disebabkan oleh satu faktor saja,

melainkan merupakan hasil dari berbagai persoalan pemerintahan yang kurang mendapat perhatian pada masa kepemimpinan Soekarno. Salah satu persoalan utama adalah kurangnya perhatian terhadap aspirasi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta minimnya dukungan dana untuk kebutuhan operasional militer.

Dari sisi politik dan administrasi, muncul sejumlah permasalahan, seperti berakhirnya keseimbangan kepemimpinan antara Soekarno dan Mohammad Hatta setelah Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Selain itu, tuntutan daerah terkait otonomi, pengelolaan keuangan, pembangunan infrastruktur, serta stabilitas keamanan belum ditangani secara optimal. Pemerintah daerah juga merasakan adanya ketidakadilan dalam distribusi hasil pembangunan yang cenderung terpusat, terutama yang berdampak pada wilayah Sumatera Barat. Ditambah lagi, adanya pembatasan peran kelompok militer daerah oleh Jenderal A.H. Nasution serta kekhawatiran terhadap pengaruh komunis turut memperkeruh situasi.

Munculnya PRRI dapat dipahami sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat. Ketimpangan dalam pelaksanaan otonomi daerah serta fokus pembangunan yang lebih terpusat di Pulau Jawa membuat daerah lain merasa terabaikan. Pemerintah pusat sendiri memandang PRRI sebagai bentuk pemberontakan yang harus ditindak tegas. Namun, jika dilihat dari latar belakangnya, gerakan ini lebih merupakan bentuk protes keras terhadap sistem pemerintahan yang dianggap terlalu sentralistik dan tidak adil dalam pembangunan. Oleh karena itu, PRRI tidak semata-mata dapat dipandang sebagai gerakan separatis, melainkan sebagai upaya koreksi terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai menyimpang dari konstitusi.

PRRI yang terjadi Sumatera Utara menimpa kota Sibolga hal ini dikarenakan Sibolga merupakan pelabuhan utama Bandar Dagang. Sibolga menjadi penting karena menjadi tempat penyalur hasil bumi masyarakat daerah Mandailing dan sekitarnya untuk dikirim ke berbagai daerah. Sibolga juga merupakan penyuplai kapur barus, garam dan karet yang diekspor sampai ke Singapura. Hal ini dijelaskan dalam koran kolonial berbahasa Belanda dengan judul *Indrukken Van Tapanuli (I) Sibolga's rubberfabrieken draaien dag en nacht* yang diterbitkan *Deli Courant* dan *De Sumatera Post* diterbitkan pada 10 April 1951. Isi korannya adalah "Pabrik-pabrik karet di Sibolga beroperasi siang dan malam. Semua orang menggunakan lateks untuk ekspor ke Singapura. Selain surat kabar *Deli Courant* dan *De Sumatera Post* arsip yang menerangkan mengenai pentingnya Sibolga yang menjadi nadi Sumatera Utara adalah tercatat dalam sebuah arsip milik Belanda *Het Zout In Tapanuli VOORDRACHT* yang ditulis oleh P.C.

Arends Jr. pada halaman 3 menyatakan “Di titik impor Tapanoeli, yaitu Sibolga dan Baroes, garam sudah berharga lebih dari f 0,45 per 21 picol (kira-kira f 15 per picol jika dibeli oleh kati).” Pada surat kabar yang terbit pada 22 Juli 1948 yang diterbitkan oleh Pers Limburgia, tempat penerbitan Venlo. Isi surat kabarnya adalah “Antara mendapat informasi dari kalangan yang terpercaya bahwa pemerintah pusat republik telah menetapkan kota Sibolga (Tapanuli) sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara”. Berdasarkan beberapa artikel koran kolonial yang ditemukan maka tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa Sibolga kota pelabuhan penting.

Hadinya komunisme di Sibolga menjadi titik awal terjadinya berbagai pemberontakan di Sibolga. Sibolga merupakan pelabuhan yang mudah dimasuki berbagai pihak. Termasuk pihak-pihak yang ingin mengganggu ketentraman disana. Komunisme tercium keberadaannya di Sibolga pertama pergerakannya dimuat dikoran terbit 11 Februari 1927 koran ini diterbitkan oleh J. Van Poll Suykerbuyk bertempat di Roosendaal dengan judul surat kabar Konstitusi. Koran yang menerbitkan adalah Deli Courant yang mendapat berita dari Aneta yang memberi sinyal dari Medan. Isi surat kabar tersebut menceritakan “Deli Courant melaporkan bahwa ada rencana di Sibolga untuk mengganggu ketertiban di pasar selama kunjungan gubernur dan untuk menyerbu Batang Toru dan Sibolga. 16 orang ditangkap dan 28 orang yang kehadirannya dianggap tidak diinginkan diusir”.

Setelah gagal rencana komunis pada tahun 1927. Mereka tidak berhenti karena kegagalan tersebut. Gagalnya aksi pada 1927 membuat pemerintahan kolonial yang berada di Sibolga pada 23 Desember tahun 1929 berita ini diterbitkan oleh Surat Kabar Hindia Belanda dengan judul Pengasingan diterbitkan di Surabaya. Mengabarkan bahwa “Si Tompoel marga Manik, berusia sekitar 28 tahun, mantan kuli, pekerja jalan, tukang cukur, petani, dan pedagang karet di Sibolga dan Sarudik (distrik Sibolga dan sekitarnya di wilayah Tapanuli), propagandis Partai Komunis Indonesia di sub-seksi Sarudik, di Jago-Jago dan Lopian, Kuria Badiri (distrik Sibolga dan sekitarnya), lahir di Sarondik dan terakhir tinggal di sana, saat ini dipenjara di penjara dan rumah tahanan di Pamekasan.

Akibat tindakan Komunisme yang mengganggu keamanan di Sibolga maka pemerintah Kolonial menetapkan aturan ketat terkait keluar masuk pelabuhan Sibolga. Aturan yang diberlakukan termuat dalam surat kabar diterbitkan oleh De Sumatera Post pada 11 September 1936. Penerbitnya adalah J. Hallerman. Tempat penerbitan surat kabar ini adalah di Medan. Terjemahan surat kabar ini adalah “Situasi politik di Tapanoeli. pengetatan tindakan. Pada Agustus 1933, pemerintah seluruh Hindia Belanda menetapkan peraturan pembatasan

berkumpul, yang disebut larangan berkumpul, yang berlaku untuk partai-partai politik ekstremis P.N.I. dan P.I. (Partindo). Pada bulan yang sama, Residen Pantai Barat Sumatera dan Tapanuli mengeluarkan keputusan yang menyatakan peraturan pembatasan berkumpul ini berlaku untuk Permi dan P.S.I.I. di Pantai Barat Sumatera dan distrik Padang Sidempuan dan Sibolga. Peraturan perjalanan tahun 1918 juga diberlakukan untuk Pantai Barat Sumatera dan dua distrik Tapanoeli yang disebutkan di atas, yang menetapkan bahwa kategori orang tertentu dari luar distrik tersebut dan dari luar Pantai Barat Sumatera dilarang memasuki wilayah ini tanpa paspor. Langkah-langkah pemerintah ini tampaknya menekan semua propaganda politik ekstrem.

Pengetatan aturan ini dibuat bukan tanpa sebab pasalnya sebelum tahun 1936 tepatnya pada tahun 1933 Para pemimpin organisasi P.I. yang berada di Sibolga ditangkap. P.I. sendiri merupakan organisasi Hubungan antara PI dan kelompok komunis sebenarnya sudah terjalin sejak 1913, meskipun pada awalnya belum terlalu kuat. Kedekatan itu kemudian semakin berkembang ketika Hatta memimpin PI. Tokoh seperti Darsono dan Semaun yang pernah diasingkan dari Hindia Belanda ikut bergabung sebagai anggota PI dan kerap hadir dalam pertemuan-pertemuan organisasi. Untuk memperkenalkan gagasan PI di tingkat internasional, organisasi ini mengutus Semaun dan Iwa Kusumasumantri sebagai wakil dalam Komintern. Keterlibatan tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar 8 November 1925 hingga 1926. Anggota P.I. yang ditangkap di Sibolga Para pemimpin P.I. ditangkap. Menurut Aneta dari Sibolga, para pemimpin P.I., Mahamad Djoni, alias Banteng-Gemoek, dan Mohamad Noer telah ditangkap sehubungan dengan penerapan peraturan perjalanan tahun 1918 ke distrik Sibolga dan Padang Sidempoean. Kedua pemimpin P.I. tersebut kini telah dipulangkan ke Pantai Timur.

Setelah beberapa kegiatan komunisme Sibolga digagalkan. Jalur keluar masuk Sibolga juga diperketat. Nampaknya upaya-upaya tersebut berhasil menekan kegiatan komunisme di Sibolga namun sangat di sayangkan keadaan Sibolga setelahnya tidak pernah kondusif lagi hal ini terbukti dari surat kabar yang terbit pada tahun 1947. "Dalam laporan resmi yang tertunda dari Sibolga, dilaporkan hasil penyelidikan yang dimulai di Sibolga menyusul insiden yang baru-baru ini terjadi di sana, di mana kapal "Bankert" dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda menembaki pantai dekat Sibolga. Laporan yang disusun mengenai masalah ini menyatakan bahwa pada tanggal 10 Mei, dua orang tewas dan lima orang luka-luka, sedangkan pada tanggal 12 Mei, enam orang tewas dan lima orang luka-luka. Enam puluh rumah yang terletak

di kawasan Pecinan kota itu rusak akibat kebakaran yang terjadi sebagai akibat dari pemboman tersebut. Total kerugian diperkirakan mencapai satu juta gulden Jepang.

Beberapa rentetan peristiwa yang telah menimpa Sibolga mulai dari rencana Komunis yang berhasil digagalkan, penembakan yang dilakukan oleh Belanda yang menewaskan dan membuat banyak kerugian. Keadaan yang tidak stabil ini tentunya membuat masyarakat Sibolga merasa tidak aman. Masyarakat Sibolga merasa pemerintah kurang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat Sibolga. Hal ini disampaikan dalam surat kabar yang mengabarkan bahwa vandalisme di Sibolga sangat tinggi. Hal ini tentunya sebagai bentuk protes masyarakat dan bentuk rasa ingin menunjukkan bahwa mereka punya bandar dagang penting tetapi masyarakatnya banyak yang tidak sejahtera. “pikir kami sudah terbiasa dengan tingkat vandalisme tertentu di tempat-tempat seperti Makassar, Surabaya, dan Priok, tetapi Sibolga jauh melampaui kami. Di siang bolong, semua yang mereka inginkan dirusak, dicuri, dan dibagikan di antara pihak-pihak yang berkepentingan di perahu-perahu, dengan cara yang tidak senonoh. Peti-peti rokok dikosongkan, kemasan bal batik dipotong dari tali logamnya untuk mengambil isinya, dan seluruh karung gula dipindahkan ke perahu-perahu kecil dan dibawa ke kampung di luar area pelabuhan. Pada pukul sepuluh pagi, semuanya sudah mabuk, dan teluk Tapanuli tampak seperti tempat pesta yang diadakan oleh armada kapal: peti-peti kosong dan botol-botol mengapung di mana-mana. Antusiasme dan kebaikan apa pun yang tersisa di antara awak kapal Indonesia terbunuh di sini ketika seseorang harus pasif menyaksikan vandalisme ini”. Akhirnya, hal itu menjadi terlalu berat bagi anggota kru kami yang berlayar di sepanjang jalan untuk menanggungnya. Dari rasa aman yang sudah tidak ada, harus hidup serba kekurangan. Akhirnya hal-hal inilah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya PRRI di Sibolga yang dicetuskan oleh Mayor Simbolon dan Mayor Nainggolan.

METODE PENELITIAN

Sebuah metode penelitian sudah pasti menggunakan metodologi. Pada dasarnya, metodologi digunakan untuk menentukan cara yang paling tepat dalam mengamati suatu objek agar kebenaran dapat ditemukan. Ketika objek yang diamati adalah manusia, perilakunya tidak hanya dipengaruhi oleh kenyataan yang terlihat secara nyata, tetapi juga oleh pandangan dan pemahaman pribadi. Oleh sebab itu, metode yang dipakai harus dapat menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan yang ada karena melihat kedua sisi tersebut agar dapat menjelaskan secara benar penyebab terjadinya suatu fenomena sosial. Penelitian ini termasuk dalam

penelitian sejarah, sehingga pendekatan yang digunakan adalah metode sejarah. Dalam metode ini, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam proses penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tahap pertama adalah heuristik. Pada tahap ini, peneliti mencari dan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, sehingga sumber yang dikumpulkan berasal dari buku, jurnal, surat kabar, majalah, serta berbagai informasi yang diperoleh melalui internet dan secara manual sumber dapat berupa buku, jurnal, surat kabar, majalah dan informasi dari internet. Sumber berupa arsip diperoleh dari website delpher dan nationaalarchief. Tahap kedua adalah kritik sumber. Setelah berbagai sumber berhasil dikumpulkan, penulis melakukan penilaian terhadap sumber-sumber tersebut. Penilaian ini meliputi kritik internal dan kritik eksternal untuk menilai keabsahan dan kebenaran isi sumber.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diolah dan disusun sehingga membentuk urutan peristiwa yang saling berkaitan. Melalui proses ini, peneliti kemudian menyusun sebuah cerita sejarah yang menggambarkan keadaan pada masa itu. Narasi yang dibuat harus memperhatikan hubungan sosial serta sebab dan akibat dari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Tahap keempat adalah historiografi. Pada tahap ini, peneliti bertujuan untuk menuliskan kembali seluruh peristiwa masa lalu yang benar-benar terjadi. Fakta-fakta sejarah yang telah disatukan sebelumnya kemudian disusun menjadi sebuah tulisan sejarah.

Historiografi dilakukan dengan menyajikan fakta tersebut secara runtut, kritis, dan analitis. Melalui tahap ini, peneliti berharap dapat menghasilkan tulisan sejarah yang baik, bersifat ilmiah, serta memiliki nilai dan manfaat bagi pembaca. Menulis merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan oleh sejarawan maupun penulis sejarah. Hal ini karena sejarah pada dasarnya adalah cerita tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang disusun secara runtut dan berurutan. Oleh sebab itu, tulisan menjadi cara yang paling tepat untuk menyampaikan dan menggambarkan peristiwa sejarah tersebut.

Selain menggunakan metode penelitian sejarah, digunakan juga pendekatan sosial dalam kajian ini dibantu juga dengan adanya teori. Teori yang digunakan dalam mengkaji PRRI di Sibolga: Studi Historis Pergolakan Daerah 1957-1958 adalah Teori Gerakan Sosial. Teori ini menitikberatkan pada kajian mengenai cara dari sebuah gerakan sosial dapat terbentuk dan mencapai keberhasilan melalui berbagai proses sosial yang dijalankan. Teori Gerakan Sosial

berangkat dari asumsi bahwa ketidakpuasan dalam masyarakat dapat menjadi pemicu lahirnya sebuah gerakan sosial.

Pengkajian mengenai PRRI di Sibolga 1957-1958. Teori Gerakan Sosial dalam mengkaji PRRI teori ini melihat bahwa Masyarakat Sibolga merupakan masyarakat yang kaya Sibolga merupakan daerah pengekspor kapur barus garam dan juga karet. Banyak pabrik-pabrik karet berdiri di Sibolga didirikan oleh orang-orang Tionghoa salah satu contohnya adalah pabrik karet yang didirikan di daerah sarudik. Meskipun Sibolga merupakan daerah yang kaya namun masyarakatnya banyak yang mengalami kekurangan hal ini terbukti bahwa tingkat vandalisme di Sibolga sangat tinggi vandalisme sendiri merupakan rasa ingin menunjukkan bahwa Sibolga itu punya Bandar dagang yang penting tapi masyarakatnya tidak sejahtera bahkan vandalisme Sibolga itu jauh lebih berbahaya dibandingkan vandalisme yang terjadi di Makassar Surabaya dan Priok.

Misalnya pada siang hari kapal-kapal dagang yang singgah banyak yang dirusak dicuri dan dibagikan di antara pihak-pihak yang berkepentingan di perahu-perahu dengan cara yang tidak senono peti-peti rokok dikosongkan kemasan Ball batik dipotong dari tali logamnya untuk mengambil isinya dan seluruh karung gula dipindahkan ke perahu-perahu kecil dan dibawa ke kampung di luar area pelabuhan. Akses jalan umum di Sibolga pun sudah tidak pernah diperbaiki kekacauan sudah banyak terjadi di Sibolga baik yang dilakukan oleh komunis sebagai pemicu awal pemberontakan penembakan yang dilakukan oleh pihak Belanda pada tahun 1947. Hilangnya rasa aman menjadi alasan mereka melakukan pergerakan. Pergerakan yang mereka lakukan didukung pula oleh mayor Boyke Nainggolan dan mayor Simbolon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Terjadinya PRRI

Peralihan dari status sebagai wilayah jajahan menuju negara merdeka tidak berlangsung dengan mudah. Pada masa tersebut, Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dari upaya Belanda untuk kembali berkuasa dalam periode Revolusi Fisik (1945–1949). Di sisi lain, negara juga dituntut membangun sistem pemerintahan yang kokoh, memperbaiki kondisi ekonomi yang melemah akibat perang, serta menyatukan masyarakat yang beragam dari segi

sosial dan politik.¹ Pergolakan di daerah-daerah pada pertengahan tahun 1950-an pertama kali muncul di Sumatra. Menjelang akhir 1956 hingga awal 1957, terbentuk beberapa dewan di wilayah tersebut, yaitu Dewan Banteng di Sumatra Tengah, Dewan Gajah di Sumatra Utara, dan Dewan Garuda di Sumatra Selatan. Ketiga dewan ini dipimpin oleh para perwira militer yang sedang bertugas di daerah masing-masing. Kemunculan mereka merupakan bentuk respons terhadap kondisi bangsa dan negara pada masa itu. Dalam situasi seperti itu, masyarakat menilai bahwa pemerintah sipil tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Karena itu, inisiatif mulai diambil alih oleh kalangan militer di masing-masing daerah. Setelah munculnya tiga dewan di Sumatra, kemudian lahir pula Dewan Lambungmangkurat di Kalimantan Selatan, Komando Perdamaian Nasional (Kopernas) di Jawa Barat, serta Perjuangan Semesta (Permesta) di Indonesia Timur.

Pada bulan Desember 1956, para perwira tentara di Sumatra—yang sebagian besar merupakan bekas anggota Divisi Banteng pada masa Revolusi—mulai mengambil sikap menentang pemerintah pusat di Jakarta dengan dukungan masyarakat sipil setempat. Tanggal 20 Desember 1956, komandan resimen di Sumatra Barat mengambil alih pemerintahan sipil. Dua hari kemudian, Kolonel Maludin Simbolon menyatakan pengambilalihan kekuasaan di Sumatra Utara. Tidak lama setelah itu, panglima di Sumatra Selatan menekan gubernur sipil agar menjalankan kebijakan otonomi. Dewan-dewan militer di Sumatra dengan cepat memperoleh dukungan dari masyarakat karena melakukan berbagai perbaikan, seperti pembangunan sekolah dan jalan serta upaya memberantas korupsi. Sementara itu, pemerintah pusat di Jakarta menanggapi dengan memblokade wilayah Medan dan menunjuk pimpinan militer baru di Sumatra Utara, setelah Kolonel Maludin Simbolon berhasil dijatuhkan pada 27 Desember 1956.²

Pada tahun 1957 hingga 1958, Indonesia mengalami masa yang penuh kesulitan. Kondisi ekonomi yang memburuk, ditambah dengan pemberontakan yang terus dilakukan oleh gerakan Darul Islam, membuat pemerintah pusat di Jawa kewalahan. Di sisi lain, muncul pula gerakan dari daerah-daerah yang dipimpin oleh para komandan militer setempat, terutama di wilayah Sumatera dan Sulawesi, yang mulai menentang kekuasaan pemerintah pusat. Setelah Indonesia merdeka, Belanda masih mempertahankan kekuasaannya di Papua Barat (Irian Barat). Pada

¹ Tati Rohayati Subhan Rizki Dayani, "Pemberontakan PRRI dan Permesta: Ketegangan Politik Di Awal Orde Lama (1957-1958)," *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (Aceh) 2, no. 3 (2025): 443.

² Faishal Hilmy Maulida, "Hitam Putih PRRI-PERMESTA: Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda 1956-1961," *Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia* (Jakarta) 8, no. 2 (2018): 176–77.

tahun 1957, Indonesia menuntut agar wilayah tersebut dikembalikan. Namun, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mendukung tuntutan itu, Presiden Sukarno mengambil langkah dengan menyita perusahaan dan perkebunan milik Belanda. Meskipun tindakan ini didorong oleh semangat nasionalisme, dampaknya cukup berat bagi perekonomian Indonesia. Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan tersebut diambil alih oleh serikat pekerja yang sebagian besar dipengaruhi oleh PKI, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari pihak Amerika Serikat terhadap kemungkinan berkembangnya pengaruh komunisme. Pada masa itu juga, banyak daerah di luar Pulau Jawa memiliki kebebasan yang cukup besar dan pada praktiknya dikuasai oleh para perwira militer setempat. Kondisi ini bertahan, salah satunya karena adanya aktivitas penyelundupan hasil-hasil daerah seperti karet mentah, kopra, dan komoditas lainnya, terutama ke Singapura.³

Sibolga yang merupakan pelabuhan bandar dagang tak luput hadirnya gerakan menentang kekuasaan pemerintah pusat. Misalnya saya yang tercatat dalam sebuah koran Belanda berikut:

Pada tahun 1950 terjadi mogok kerja di Sibolga. Aksi mogok kerja di pelabuhan Sibolga memiliki konsekuensi serius. Selama Buruh Pelabuhan dan Perkapalan (serikat buruh pekerja pelabuhan di Sibolga) tetap melakukan mogok kerja, tidak akan ada barang yang dibawa dari Medan ke Sibolga, demikian laporan Aocta dari Sihel gn. Akibatnya, transportasi pelabuhan di Tapanuli terancam terhenti. Lebih jauh lagi, Tapanuli terancam sebagian wilayahnya akan gelap gulita. Saat ini hari Senin. Kapal Lasbahi sedang dalam perjalanan ke Sibolga dengan membawa 450 drum minyak bumi. 150 drum minyak solar dan 100 drum diesel. Jika pemogokan berlanjut, mesin generator penerangan tidak dapat beroperasi, sementara mereka yang bergantung pada penerangan berbahan bakar minyak bumi juga akan mengalami kesulitan. Pompa bahan bakar tidak memiliki pasokan bahan bakar dan sedang berhenti beroperasi.⁴

Selain aksi mogok kerja yang terjadi pada tahun 1950. Masih banyak serentetan tragedi di Sibolga setelah kemerdekaan berkumandang pada 1945. Misalnya saja pada 13 Mei di tahun 1947. Terbit sebuah surat kabar Koran Provinsi Overijssel dan Zwolle yang diterbitkan oleh

³ Daniel F. Doeppers, "An Incident In The PRRI/PERMESTA Rebellion Of 1958," *Cornell University Press* (Amerika Serikat) 14 (Oktober 1972): 187.

⁴ Donderdag, "Havenstaking In Sibolga Heeft Ernstige Gevolgen," *Delpher* (Medan), 20 Juli 1950.

penerbit M. Tyl dan putranya H. Tyl. Dalam koran tersebut menceritakan keadaan Sibolga yang sangat mencekam.

Insiden di pelabuhan Sibolga. Layanan Informasi Angkatan Laut melaporkan bahwa selama inspeksi kapal perang m.s. "Nan Mei" di perairan Sibolga oleh Hr. "Ma Banckert", sebuah kapal perang "reptil blikeins" muncul, yang tidak mematuhi perintah untuk berhenti, yang diulang tiga kali dan dipahami oleh kapal tersebut. Kemudian, tembakan peringatan dilepaskan oleh perahu motor Banckert, setelah itu terdengar tembakan senapan mesin dan senapan yang gencar dari pantai. Tembakan ini diredam oleh kapal perusak Belanda. Kapal Inggris berbobot 800 ton "Nan Mei" memuat 50 ton karet di Sibolga milik pemilik yang tidak diketahui; kapal tersebut memiliki izin navigasi yang diperlukan. Sebagian awak kapal, termasuk warga negara Inggris, dilarang kembali ke kapal oleh pihak berwenang Indonesia. Kebakaran yang cukup besar terlihat di Sibolga, dan dikhawatirkan kerusakan dan jumlah korban jiwa di sana akan cukup besar. (Sibolga terletak di pantai barat Sumatra).⁵

Sesudah terjadinya tragedi pada 13 Mei tahun 1947. Kejadian mencekam masih berlanjut di Sibolga. Pada 31 Mei 1947 Pelabuhan Sibolga ditembaki oleh kapal Bankert dari Angkatan laut kerajaan Belanda. Yang memakan banyak korban Jiwa. Berikut isi surat kabar tersebut:

Dalam laporan resmi yang tertunda dari Sibolga, dilaporkan hasil penyelidikan yang dimulai di Sibolga menyusul insiden yang baru-baru ini terjadi di sana, di mana kapal "Bankert" dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda menembaki pantai dekat Sibolga. Laporan yang disusun mengenai masalah ini menyatakan bahwa pada tanggal 10 Mei, dua orang tewas dan lima orang luka-luka, sedangkan pada tanggal 12 Mei, enam orang tewas dan lima orang luka-luka. Enam puluh rumah yang terletak di kawasan Pecinan kota tersebut rusak akibat kebakaran yang terjadi sebagai akibat dari bombardir. Total kerugian diperkirakan mencapai satu juta gulden Jepang. (Antara)⁶ Selain terjadi penyerangan yang dilakukan di Sibolga.

Pada 20 Juli 1950 terjadi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh di Sibolga. Para buruh melakukan aksi mogok kerja dikarenakan mereka digaji kecil. Berikut isi surat kabar yang menerangkan hal tersebut:

Aksi mogok kerja di pelabuhan Sibolga memiliki konsekuensi serius.

Selama Buruh Pelabu han dan Perkapalan (serikat buruh pelabuhan) di Sibolga tetap melakukan mogok kerja, tidak akan ada pasokan minyak linder silinder dari Medan ke Sibolga,

⁵ H. Tyl M. Tyl, "Incident In De Haven Van Sibolga," *Koran Provinsi Overijssel dan Zwolle* (Zwolle), Mei 1947.

⁶ "Pesan-Pesan Partai Republikan Tentang Sibolga," *AMACAB* (Surabaya), Mei 1947.

lapor Aucta dari Sibolga. Akibatnya, transportasi motor di Tapanuli terancam lumpuh sebagian. Untuk keluar dari kegelapan. Saat ini, m.s. KaLabahi sedang dalam perjalanan ke Sibolga dengan membawa 450 drum minyak bumi, 150 drum minyak solar, dan 100 drum minyak diesel. Jika pemogokan berlanjut, mesin generator tidak dapat beroperasi, sementara mereka yang bergantung pada penerangan berbahan bakar minyak juga akan menghadapi kesulitan. Pabrik penggilingan padi tidak memiliki stok bahan bakar dan berhenti beroperasi.⁷

Kondisi Sibolga semakin lama semakin bertambah kacau setelah aksi mogok kerja yang terjadi pada 1950. Masih ada kejadian lain yang terjadi di Sibolga. Peristiwa ini terjadi pada 10 Januari 1957, beberapa bulan sebelum terjadinya PRRI di Sibolga. Bahan bakar bensin sulit didapatkan stok yang dimiliki Sibolga hanya mampu bertahan untuk 10 hari saja. Hal ini diceritakan secara lengkap dalam surat kabar *Java Bode*. Yang menerangkan bahwa Tidak ada SPBU di Tapanuli. Laporan dari Sibolga menunjukkan bahwa, akibat peristiwa militer di Sumatera Utara, pasokan bensin dan solar di Tapanuli praktis habis, yang menyebabkan keresahan di kalangan perusahaan-perusahaan otomotif di sana. Lebih jauh lagi, mereka hanya memiliki pasokan minyak bumi yang cukup untuk sepuluh hari. Menurut Radio Sibolga, kekurangan bensin dan berbagai produk minyak disebabkan oleh blokade Tapanuli oleh Sumatera Timur. Menurut Radio Sibolga, semua jenis produk minyak yang ditujukan untuk Tapanuli telah disita oleh tentara di Pematang Siantar. Pihak komando kota Sibolga telah mengumumkan bahwa langkah-langkah akan diambil untuk mengatasi kekurangan ini, dan komando kota tersebut dilaporkan telah mengirim telegram ke Dewan Bargeng di Padang untuk mengangkut minyak dari Padang ke Sibolga.⁸

Dari awal kemerdekaan tepatnya ditahun 1945 sampai 10 Januari 1957 keadaan Sibolga sangat mencekam. Masyarakat banyak mengalami kesengsaraan. Pemicu utamanya adalah bahan bakar yang sering terlambat datang ke Sibolga yang menyebabkan kegiatan ekspor-impor, dan kegiatan industri di Sibolga terhambat. Pekerja juga melakukan mogok kerja karena upah yang mereka terima sangat kecil. Selain faktor ekonomi, faktor kesehatan juga kurang diperhatikan oleh pemerintah pasalnya pada tahun 1949 masyarakat Sibolga dilaporkan terinfeksi cacar. Hal ini tertulis dalam surat kabar *Deli Courant* dan *De Sumatera Post* yang terbit pada 16 November 1949 di Medan. Belum ditemukan surat kabar yang menceritakan

⁷ *Surat Kabar Untuk Sumatera Aksi Mogok Kerja di Pelabuhan Sibolga Memiliki Konsekuensi Serius*, (Medan), 20 Juli 1950.

⁸ "Tidak Ada SPBU di Tapanuli," *Java Bode* (Batavia), 10 Januari 1957.

tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani peristiwa cacar yang menjangkit masyarakat Sibolga ini.

2. Kondisi Sosial-Politik Sibolga Sebelum PRRI



Gambar 1 Peta Sibolga Pada Masa Kolonial Tahun 1919Foto ini di dapatkan dari Departemen Pekerjaan Sipil Pekerjaan Umum Informasi dan LaporanBagian G dengan Judul “ Pekerjaan untuk Kepentingan Kesehatan”. Di Delpher

Kedatangan kolonial Belanda secara perlahan membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Sibolga. Mereka mengambil alih kepemimpinan di wilayah ini sehingga kekuasaan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan pihak kolonial. Belanda menjadi penguasa tertinggi dalam sistem pemerintahan Sibolga pada masa itu. Di bidang ekonomi, Sibolga juga mengalami perkembangan dengan dibangunnya pelabuhan yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan perdagangan dan perekonomian. Sejak masa sebelumnya, Sibolga memang sudah berperan sebagai pusat pemerintahan. Peran ini terus berlanjut hingga masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, yang secara bertahap mendorong perubahan pola hidup masyarakat ke arah kehidupan perkotaan. Seiring waktu, Sibolga berkembang menjadi kota yang berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial. Perkembangannya semakin pesat setelah Sibolga ditetapkan sebagai Kotapraja atau Kotamadya pada tahun 1956, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Tengah.⁹

⁹ Wandi Adiguna Simanungkalit, “Identifikasi Bangunan Sejarah di Sibolga Pada Tahun 1829-1945,” *UNIMED* (Medan) Skripsi (2013).

Pada tahun 1919 di terbitkan sebuah laporan dari Departemen Pekerjaan Sipil Pekerjaan Umum Informasi dan Laporan. Mereka melaporkan bahwa pada tahun tersebut keadaan Sibolga sangat kumuh. Sibolga belum memiliki saluran drainase yang baik hal inilah yang membuat masyarakat Sibolga pada saat itu sangat mudah terinfeksi penyakit malaria, dan cacar. Di Sibolga penduduk Eropa tinggal di daerah Simare-Mare, sedangkan masyarakat biasa bermukim di Sibolga Julu dan ada juga tersebar di beberapa wilayah sedangkan etnis Tionghoa mendiami daerah Kampung Santiong, atau Santeong. Berikut isi arsip belanda tersebut:

Er werd alzoo te Sibolga afgezien van een open spoellei-dingsysteem en ook werd het voornemen om de open leidingen af te sluiten door middel van eene afdekking met planken ten slotte verre verworpen als zijnde nog gevaarlijker dan open leidingen, doordat le. de afsluiting absoluut onvoldoende is en 2e. Besloten werd toen om in de geheele inlandsche wijk in een gedeelte waarvan ook nog europeesche woninger, staan en in de europeesche wijk Sibolga Djoeloe", eene onder-grondsche rioleering aan te leggen.¹⁰



Gambar 2 Pemukiman Masyarakat dan Pembangunan Drainase di Sibolga pada tahun 1919 sumber diambil dari koran Belanda di Delpher

Sibolga merupakan kota penting pada zaman kolonial hal ini terbukti melalui koran Belanda *Bataviaasch* yang diterbitkan pada 28 Juni 1927 oleh Kolff & Co yang mana koran tersebut menceritakan mengenai izin pendirian Pabrik Karet di Sibolga milik orang Tionghoa yang bernama Kho Kha Hwee yang berprofesi sebagai pedagang, dan juga Pabrik Karet Milik

¹⁰ A. Weltevreden, "Afdeeling G. Weken In Het Belang Van De Gezondheid," IV (*Asaineering Van Sibolga.*) (Sibolga), 1919.

Belanda yang sudah keluar perizinannya. Sampai sekarang Pabrik Karet tersebut masih aktif beroperasi di daerah Sarudik. Isi koran tersebut sebagai berikut:

Kho Kha Hwee, seorang pedagang di Sibolga, diberikan izin oleh G. B. untuk mengoperasikan pabrik produksi karet untuk penduduk di sebidang tanah yang terletak di kampong Paremboenan Aik Habil, distrik Sibolga, divisi Sibolga dan Omme-landen, di wilayah Tapanoeli. Serikat Karet Belanda (N.V.) telah diberikan izin untuk mendirikan dan mengoperasikan pabrik produksi karet untuk penggunaan umum di lahan seluas kurang lebih 16.038 m², yang terletak di antara penanda kilometer 3 dan 4, di sebelah kiri jalan utama dari Sibolga ke Padang Sidempoean. Tan Sue Say, Lie Pic Tao, dan The Tong Po di Sibolga telah diberikan izin untuk mendirikan dan mengoperasikan pabrik produksi karet untuk konsumsi manusia di lahan seluas 13.234 m², yang terletak di Aek Aek Saroedik pada kilometer 4, di sebelah kanan jalan utama dari Sibolga ke Padang Sidimpuan.¹¹

Pada tahun 1922 di Sibolga diadakan pertemuan tujuan pertemuan tersebut adalah untuk mempererat persaudaraan sesama rakyat Bumiputera walaupun dengan agama yang berbeda. Dalam pertemuan itu juga dibahas bahwa Islam itu agama yang tidak merusak keselamatan negeri Hindia Belanda. Selain itu pertemuan ini juga membahas mengenai pemerataan pendidikan tanpa pandang statatus sosial. Kegiatan pertemuan ini dihadiri oleh Persatuan Musyawarat Perhimpunan-Perhimpunan dari Sumatera Tengah yang diadakan di Sibolga. Pada tanggal 20-21 November 1921 dihadiri oleh wakil dari Perhimpunan Sarekat Islam Sibolga, Sarekat Islam Sipirok, Sarikat Islam Barus, Koeris Bond, Hatopan Kristen Batak, N. I. P. Padang, Saudagar *Vereeniging Sibolga*, *Chauffeurs-bond Sibolga*, *Vereeniging Kemadjoewan Sibolga*, dan oleh masyarakat lebih kurang 2000 orang, sebagai pembicara adalah Abdul Karim. Selain membahas mengenai persatuan antar umat beragama pertemuan itu juga membahas mengenai pendirian komisi penghematan karena pada saat itu Sibolga sedang mengalami krisis. Menjalin persatuan antar umat beragama juga dibahas dalam rapat ini bentuknya adalah diadakan *Raad Agama* Berikut isi surat kabar tersebut:

Openbare vergadering dari Persatoean Moes-jawarat perhimpoean perhimpoean dari Soema- Padang te tra Tengah di Sibolga, pada tanggal 20 dan 21 november 1921, dihadiri oleh wakilnja per-himpoean perhimpoean Sarikat Islam Sibolga, Sarikat

¹¹ Kolff & Co., *Pabrik- Pabrik Karet*, Juni 1927.

Islam Baroes, Sarikat Islam Sipirok, Koe-ris Bond, Hatopan Kristen Batak, N. I. P. Padaug, Saudagar Vereeniging Sibolga, Chauffeurs-bond Sibolga, Vereeniging Kemadjoewan Sibol-ga, dan oleh publiek lebih koerang 2000 orang, sebagai voorzitter toean Abdoe 'Ixxarim. Gecombineerde vergadering dari perhimpoeaan perhimpoeaan Boemipoetra di Soematra Tengah, seperti jang terseboet di atas tadi perloe menjampaiakan motie ini kehadapan pemerintah agoeng di Hindia serta menjampaiakan salinan motie ini kemadlis volksraad goena menjatakan pengharapannja dan memperingati kepada pemerintah, soepuja penghematan itoe di-ketjoewalikan boewat tanah Soematra; djadinja hendaklah teroes meneroes mendirikan sekolah sekolah boemipoetra seperti inheemsche school, hollandsch inheemsche school, ambachtschool, lain Normaal School, Mulo dan lain sekolah dimana dirasa perloe di Poelau Soematra, teroetama meneroeskan pendirijannja sekolah sekolah jang telah toegestaan, seperti hollinhsch. Goenoeng Sitoli, ambachtschool boewat Sibolga, serta beberapa sekolah sekolah holl. inh, school di Soematra Barat dan lain lain tempat lagi, soepaja dengan djalan begitoe tiada tertahan tahan Soematra tentang onderwijs. Soepaja dengan adanja raad agama itoe dapatlah diketahoei jang benarnja dengan djalan mana dapat poela menambahaken kekoewatannja persaudaraan sesama boemipoetra jang berigama Islam itoe dan tidak meroesakkan bagi keselamatannja negeri dan bangsa Hindia. Persatoewan itoelah nanti akan menambah banjakkja kaoem kita.¹²

Pada zaman Kolonial pers Islam juga sudah berkembang di Sibolga. Sebuah terbitan berkala kedua memang telah muncul di Sibolga, sebuah majalah Islam kecil, yang juga dicetak di percetakan Manullang. Majalah ini diedit oleh Hadji M. Pauzi dan, dari segi isi, belum terlalu signifikan. Majalah pers tersebut tidak memiliki jangka waktu pasti yang berkelanjutan pada setiap penerbitannya. Hal ini termuat dalam ALGEMEEN OVERZICHT van de INLANDSCHE (EN MALEISCH-CHINEESCHE) PERS over de maand Augustus 1924. Isi surat kabar tersebut adalah sebagai berikut:

In Sibolga is inderdaad een tweede periodiek verschenen, een Islamietisch tijdschriftje, ook gedrukt bij Manullangs drukkerij. Het staat onder redactie van hadji M. Pauzi en beteekent naar den inhoud nog niet veel.¹³

¹² Voorstel Afdeling Padang., Desember 1922.

¹³ C. SNOUCK HURGRONJE, "Algemeen Overzicht Inlandsche," *Algemeen Overzicht Inlandsche Pers. VOLKSLECTUUR WELTEVREDEN.*, 1936.

3. Masuk dan Berkembangnya Pengaruh PRRI di Sibolga

Setelah kabar Proklamasi Kemerdekaan sampai ke Sibolga, Residen Tapanuli mengeluarkan seruan kepada masyarakat agar bangkit dan ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Menanggapi seruan tersebut, para pemuda Sibolga secara spontan membentuk kelompok-kelompok bersenjata yang dikenal dengan nama Laskar Barisan Rakyat. Pada tanggal 3 November 1945, Wakil Presiden Republik Indonesia mengeluarkan sebuah Maklumat yang memberikan izin kepada partai-partai politik untuk membentuk laskar rakyat masing-masing. Dengan adanya Maklumat tersebut, partai-partai politik mulai bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi serupa juga terjadi di Sibolga. Banyak partai politik didirikan, dan masing-masing partai memiliki barisan atau pasukan yang berperan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.¹⁴

Sebelum melakukan pemberontakan Mayor Simbolon sempat menyampaikan pidato kepada masyarakat Sibolga. Selama berada di Sibolga, Kolonel Simbolon telah memberikan ceramah sejak tanggal 20 Februari dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan di Sibolga oleh perkumpulan guru. Beberapa organisasi dan anggota, antara lain, PGRI (asosiasi untuk keluarga anggota angkatan bersenjata, khususnya para perwira), Kolonel Simbolon juga memberikan ceramah di gedung nasional di Sibolga. Dalam ceramahnya, Kolonel Simbolon memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai peristiwa di Sumatera Utara, yang dikenal sebagai peristiwa 22 dan 27 Desember 1956. Sumpah bersama "Selama masa Belanda".

Menurut Simbolon, jalan-jalan di Tapanuli dulunya dalam kondisi baik, tetapi sekarang berada dalam keadaan yang sangat buruk. Oleh karena itu, kebebasan yang telah mereka peroleh masih terasa asing di Tapanuli (Sibolga). Banyak penduduk yang pindah ke tempat lain, mencari kehidupan yang lebih layak. Pembicara yakni kolonel Simbolon menyampaikan bahwa dirinya mengatakan jika penduduk suatu negara menunjukkan sikap apatis, ini adalah gejala bahaya yang akan datang. Bahaya itu sendiri dapat muncul dari politisasi isu-isu yang tidak memerlukan pendekatan ini, atau sebaliknya. "Kami membuat sumpah bersama justru untuk menemukan jalan keluar atau menggerakkan sesuatu, demi memperbaiki situasi. Kami ingin menjadi pelopor yang memberikan substansi pada kebebasan dengan cita-cita revolusi dan membawanya pada kesimpulan yang sukses," kata Simbolon. Selain penjelasan Kolonel mengenai peristiwa tanggal 22 dan 27 Desember 1956, peristiwa itu sendiri dan pengalaman

¹⁴ Cipto Dwi Priyono, "Laskar Laut Sibolga Pada Perang Kemerdekaan RI (1946 – 1949)," *UMTS Padangsidimpuan* (Padangsidimpuan), 2019, 45.

yang harus ia alami ketika meninggalkan kota Medan pada tanggal 27 Desember juga diceritakan kembali. Simbolon mengatakan bahwa ia meninggalkan kota Medan telah pergi, sendirian dan sangat sendirian.



Gambar 3 Koran yang menceritakan alasan Mayor Simbolon melakukan pemberontakan di Sibolga sumber didapatkan dari Website Delpher

Pemberontakan PRRI yang dilakukan oleh Mayor Simbolon memakan banyak korban jiwa, pemakaman ulang jenazah lima puluh orang yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan seharusnya berlangsung di pemakaman perang di Sibolga. Kami memahami bahwa Kolonel Simbolon akan menghadiri upacara tersebut. Agar pemberontakan tidak memakan lebih banyak lagi korban jiwa maka Pemerintah Indonesia mengirimkan detasemen Marinir dengan lima pesawat ke Sumatera Utara tak lama setelah ultimatum tujuh hari yang diberikan kepada Kolonel Simbolon yang memberontak berakhir pada tengah malam. Simbolon tidak menyerah, seperti yang diklaim oleh pemerintah Indonesia.

Selain berakibat pada banyaknya korban jiwa PRRI yang terjadi di Sibolga juga merugikan perekonomian masyarakat Sibolga. Dari segi ekonomi, konsekuensi pertama dari intervensi militer di Sumatra kini mulai terlihat. Warga Tapanuli mengirim telegram kepada Menteri Urusan Ekonomi pada hari Sabtu, mendesak agar hubungan pengiriman barang dengan Sibolga, pelabuhan terbesar di Tapanuli, segera dilanjutkan. Di gudang-gudang di sana, barang-barang itu menumpuk. Saat ini, ratusan ribu ton produk ekspor tertunda, karena dalam beberapa hari terakhir tidak ada kapal yang singgah di Sibolga. Dua kapal milik Royal Packet Shipping Company, yang dijadwalkan singgah di Sibolga pada hari Senin dan Kamis lalu, belum juga tiba.¹⁵

Pemberontakan merebut Sibolga telah terjadi pada tahun 1958 UPI melaporkan dari Singapura bahwa pasukan pemberontakan Indonesia dibawah Mayor Boike Nainggolan telah menguasai Sibolga dan Tarutung di Provinsi Tapanuli di Sumatra bagian Tengah Sibolga disebut sudah jatuh ke tangan pasukan Nainggolan pada 23 September. Menurut laporan, pemerintah otoritas Indonesia telah melarikan diri ke Pulau Nias, di seberang Sibolga. Pesawat dari pemerintah Indonesia terus menerus mengebom Sibolga sejak saat itu. 4 hari setelah perebutan Sibolga, pasukan Nainggolan menyerang dan merebut Tarutung. Tarutung terletak sekitar 65 KM timur laut Sibolga. Dari kedua kota tersebut dikabarkan pasukan Nainggolan akan maju ke Pematang Siantar yang pinggirannya sudah mereka capai pada 17 Agustus dan dicapai lagi pada 27 September. Sibolga, kembali ke tangan Jakarta setelah diduduki pemberontak para pemberontak tidak dapat memperluas dan mempertahankan posisi mereka. Pada tanggal 5 Oktober, "hari dimana pasukan tempur Nainggolan kalah dan Sibolga direbut kembali.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Perjuangan masyarakat Sibolga dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia menunjukkan besarnya semangat nasionalisme yang tumbuh setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945. Seruan Residen Tapanuli dan terbentuknya Laskar Barisan Rakyat menjadi bukti bahwa masyarakat Sibolga turut berperan aktif dalam mempertahankan kedaulatan negara. Seiring berkembangnya situasi politik, berbagai partai politik dan laskar rakyat muncul sebagai wadah

¹⁵ J.B., "Dokumentasi ANP Indonesia," *Badan Pers Den Haag* (Belanda), 1957.

¹⁶ Herkomst., *Het Nieuwsblad voor Sumatera*, 10 April 1957.

perjuangan masyarakat di daerah tersebut. Namun, kondisi politik dan ekonomi yang dianggap kurang memuaskan pada masa setelah kemerdekaan memunculkan ketidakpuasan di kalangan tertentu, termasuk Kolonel Simbolon. Melalui berbagai pidatonya di Sibolga, ia menyampaikan kritik terhadap kondisi pembangunan dan pemerintahan yang dinilai belum mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Ketidakpuasan tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi keterlibatannya dalam gerakan PRRI.

Pemberontakan PRRI di Sibolga membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Selain menimbulkan korban jiwa, konflik tersebut juga mengganggu stabilitas keamanan dan perekonomian daerah. Aktivitas perdagangan melalui Pelabuhan Sibolga terhambat, distribusi barang terganggu, dan kegiatan ekonomi masyarakat mengalami kemunduran. Meskipun pasukan pemberontak sempat menguasai beberapa wilayah, termasuk Sibolga dan Tarutung, pemerintah akhirnya berhasil merebut kembali daerah tersebut sehingga pemberontakan dapat dipatahkan. Dengan demikian, peristiwa PRRI di Sibolga memberikan pelajaran penting bahwa perbedaan pandangan politik yang diselesaikan melalui konflik bersenjata dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Persatuan, dialog, dan kerja sama antara pemerintah dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga keutuhan bangsa serta mewujudkan tujuan kemerdekaan yang dicita-citakan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Weltevreden. "Afdeeling G. Weken In Het Belang Van De Gezondheid." *IV (Asaineering Van Sibolga.)* (Sibolga), 1919.
- AMACAB (Surabaya). "Pesan-Pesan Partai Republikan Tentang Sibolga." Mei 1947.
- C. SNOUCK HURGRONJE. "Algemeen Overzicht Inlandsche." *Algemeen Overzicht Inlandsche Pers. VOLKSLECTUUR WELTEVREDEN.*, 1936.
- Cipto Dwi Priyono. "Laskar Laut Sibolga Pada Perang Kemerdekaan RI (1946 – 1949).," *UMTS Padangsidempuan* (Padangsidempuan), 2019, 45.
- Daniel F. Doeppers. "An Incident In The PRRI/PERMESTA Rebellion Of 1958." *Cornell University Press* (Amerika Serikat) 14 (Oktober 1972): 187.
- Donderdag. "Havenstaking In Sibolga Heeft Ernstige Gevolgen." *Delpher* (Medan), 20 Juli 1950.

- Faishal Hilmy Maulida. "Hitam Putih PRRI-PERMESTA: Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda 1956-1961." *Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia* (Jakarta) 8, no. 2 (2018): 176–77.
- Herkomst. *Het Nieuwsblad voor Sumatera*. 10 April 1957.
- Java Bode (Batavia). "Tidak Ada SPBU di Tapanuli." 10 Januari 1957.
- J.B. "Dokumentasi ANP Indonesia." *Badan Pers Den Haag* (Belanda), 1957.
- Kolff & Co. *Pabrik- Pabrik Karet*. Juni 1927.
- M. Tyl, H. Tyl. "Incident In De Haven Van Sibolga." *Koran Provinsi Overijssel dan Zwolle* (Zwolle), Mei 1947.
- (Medan). *Surat Kabar Untuk Sumatera Aksi Mogok Kerja di Pelabuhan Sibolga Memiliki Konsekuensi Serius*. 20 Juli 1950.
- Subhan Rizki Dayani, Tati Rohayati. "Pemberontakan PRRI dan Permesta: Ketegangan Politik Di Awal Orde Lama (1957-1958)." *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (Aceh) 2, no. 3 (2025): 443.
- Voorstel Afdeling Padang*. Desember 1922.
- Wandi Adiguna Simanungkalit. "Identifikasi Bangunan Sejarah di Sibolga Pada Tahun 1829-1945." *UNIMED* (Medan) Skripsi (2013).